

Peran Kecabangan Ajudan Jenderal Dalam Operasi Militer Selain Perang Pengamanan Wilayah Rawan di Papua Tengah

R Arie Juwanda N.D.P.A¹ Yulianto Hadi² Sungkunen Munthe³

Strategi Pertahanan Darat, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik
Indonesia, Bogor, Jawa Barat, Indonesia^{1,2,3}

Email: ariejuwanda@gmail.com¹ yulianto.hadi@yahoo.com² skunen.ginting@gmail.com³

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya peran kecabangan Ajudan Jenderal (Ajen) dalam mendukung pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), khususnya dalam penyelenggaraan pengurusan dan pemakaman jenazah prajurit di medan operasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi peran Ajen dalam OMSP pengamanan wilayah rawan di Papua Tengah serta merumuskan strategi untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas tersebut. Penelitian dilakukan di Mabesad, Direktorat Ajudan Jenderal Angkatan Darat, dan Kodam XVII/Cenderawasih dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Ajen masih bersifat administratif dan reaktif serta belum terintegrasi secara optimal dalam tahap perencanaan operasi. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan pedoman operasional yang komprehensif, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan koordinasi antar kecabangan guna mendukung efektivitas pelaksanaan OMSP.

Keywords: Ajudan Jenderal, OMSP, pengurusan jenazah, Papua Tengah



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

INTRODUCTION

Pertahanan negara merupakan salah satu fungsi fundamental dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Dalam sistem pertahanan negara Indonesia, Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki peran sebagai komponen utama yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas pertahanan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, TNI memiliki tugas pokok menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari berbagai ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, TNI menjalankan berbagai bentuk operasi militer yang disesuaikan dengan karakteristik ancaman yang dihadapi. Operasi militer yang dilaksanakan oleh TNI secara umum terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). OMP dilaksanakan dalam rangka menghadapi ancaman militer dari negara lain yang dapat mengancam kedaulatan negara, sedangkan OMSP dilaksanakan untuk menghadapi berbagai ancaman nonmiliter maupun membantu pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional. OMSP mencakup berbagai bentuk kegiatan seperti penanggulangan terorisme, pengamanan wilayah rawan, bantuan kemanusiaan, penanggulangan bencana alam, serta berbagai bentuk operasi lain yang bertujuan menjaga stabilitas keamanan nasional. Dalam konteks ini, OMSP memiliki peran yang sangat penting karena banyak ancaman terhadap keamanan nasional yang bersifat kompleks dan tidak selalu berbentuk konflik militer konvensional.

Pelaksanaan OMSP memerlukan dukungan yang terintegrasi dari berbagai unsur dalam organisasi TNI, termasuk kecabangan yang memiliki fungsi administratif dan dukungan

personel. Salah satu kecabangan yang memiliki peran penting dalam mendukung operasi militer adalah kecabangan Ajudan Jenderal (Ajen). Kecabangan ini memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan administrasi personel, administrasi umum, serta pembinaan moril prajurit. Fungsi tersebut memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan bahwa setiap prajurit yang melaksanakan tugas operasi mendapatkan dukungan administratif yang memadai serta penghormatan yang layak apabila terjadi risiko gugurnya prajurit dalam pelaksanaan tugas. Selain menjalankan fungsi administratif, kecabangan Ajen juga memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan pengurusan dan pemakaman jenazah prajurit yang gugur di medan operasi. Tugas ini tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga menyangkut dimensi kemanusiaan serta penghormatan negara kepada prajurit yang telah mengorbankan jiwa dan raganya dalam melaksanakan tugas negara. Penyelenggaraan pengurusan dan pemakaman jenazah prajurit yang dilakukan secara tertib, cepat, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku merupakan bagian penting dalam menjaga kehormatan institusi militer serta memelihara moril prajurit yang masih bertugas di medan operasi.

Dalam beberapa tahun terakhir, pelaksanaan OMSP di wilayah Papua Tengah menjadi salah satu perhatian utama dalam upaya menjaga stabilitas keamanan nasional. Wilayah tersebut memiliki karakteristik geografis yang kompleks serta dinamika keamanan yang memerlukan kesiapan operasional dan dukungan administrasi yang optimal. Kondisi geografis yang didominasi oleh wilayah pegunungan, hutan lebat, serta keterbatasan infrastruktur transportasi dan komunikasi menimbulkan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan operasi militer. Oleh karena itu, keberadaan unsur pendukung operasi, termasuk kecabangan Ajen, menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa seluruh aspek administratif dan dukungan personel dapat berjalan secara efektif. Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas berbagai aspek yang berkaitan dengan operasi militer, manajemen pertahanan, serta dukungan organisasi dalam pelaksanaan operasi militer. Penelitian yang dilakukan oleh Albert, Baez, dan Rutland (2021) menunjukkan bahwa sistem pertahanan modern memerlukan integrasi antara berbagai fungsi organisasi untuk mendukung efektivitas operasi militer dalam menghadapi ancaman yang semakin kompleks. Penelitian lain yang dilakukan oleh Wicaksana (2021) menekankan bahwa keberhasilan operasi militer di wilayah konflik sangat dipengaruhi oleh koordinasi antar unsur dalam organisasi militer, termasuk unsur pendukung administrasi dan logistik.

Selain itu, beberapa penelitian juga menyoroti pentingnya manajemen sumber daya manusia dalam organisasi militer. Studi yang dilakukan oleh Subagyo dan Kristian (2023) menunjukkan bahwa efektivitas organisasi militer tidak hanya ditentukan oleh kekuatan tempur, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam mengelola administrasi personel, sistem dokumentasi, serta koordinasi antar satuan dalam mendukung pelaksanaan operasi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa fungsi administratif memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan keberlangsungan operasi militer secara efektif dan terorganisasi. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian yang telah dilakukan masih lebih banyak menitikberatkan pada aspek strategi militer, operasi tempur, maupun kebijakan pertahanan secara umum. Kajian yang secara khusus membahas peran kecabangan Ajudan Jenderal dalam mendukung pelaksanaan OMSP, terutama dalam penyelenggaraan pengurusan dan pemakaman jenazah prajurit di medan operasi, masih relatif terbatas. Padahal, aspek tersebut merupakan bagian penting dari dukungan organisasi militer yang memiliki dampak langsung terhadap moril prajurit, penghormatan institusional, serta citra organisasi militer di mata masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan antara pengaturan normatif mengenai peran kecabangan Ajen dengan implementasi yang terjadi dalam praktik

pelaksanaan operasi militer di lapangan. Secara normatif, kecabangan Ajen memiliki tanggung jawab dalam mendukung administrasi personel serta penyelenggaraan berbagai kegiatan administratif yang berkaitan dengan prajurit. Namun dalam praktiknya, keterlibatan Ajen dalam pelaksanaan OMSP sering kali masih bersifat administratif dan reaktif, serta belum sepenuhnya terintegrasi sejak tahap perencanaan operasi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan berbagai kendala dalam penyelenggaraan pengurusan dan pemakaman jenazah prajurit di medan operasi.

Kesenjangan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai implementasi peran kecabangan Ajen dalam OMSP, khususnya dalam konteks pengamanan wilayah rawan di Papua Tengah. Kajian ini penting untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas Ajen di lapangan, sekaligus merumuskan strategi yang dapat meningkatkan efektivitas peran kecabangan tersebut dalam mendukung keberhasilan operasi militer. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kontribusi ilmiah dalam memperkaya kajian mengenai administrasi militer dan peran kecabangan dalam mendukung pelaksanaan operasi militer selain perang. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi organisasi TNI Angkatan Darat, khususnya dalam meningkatkan efektivitas sistem dukungan administrasi personel serta penyelenggaraan pengurusan dan pemakaman jenazah prajurit di medan operasi. Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi peran kecabangan Ajudan Jenderal dalam pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang pengamanan wilayah rawan di Papua Tengah, khususnya dalam penyelenggaraan pengurusan dan pemakaman jenazah prajurit di medan operasi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan strategi yang dapat meningkatkan optimalisasi peran kecabangan Ajen dalam mendukung pelaksanaan OMSP secara lebih efektif, profesional, dan terkoordinasi.

RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi peran kecabangan Ajudan Jenderal (Ajen) dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP), khususnya dalam penyelenggaraan pengurusan dan pemakaman jenazah prajurit di medan operasi. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali secara komprehensif fenomena yang terjadi di lapangan, termasuk pengalaman, persepsi, serta pandangan para informan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan tugas tersebut. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika organisasi, mekanisme koordinasi, serta berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas Ajen dalam mendukung operasi militer. Penelitian ini dilaksanakan di beberapa lokasi yang berkaitan langsung dengan fungsi dan pelaksanaan tugas kecabangan Ajen, yaitu Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Direktorat Ajudan Jenderal Angkatan Darat (Ditajenad), dan Kodam XVII/Cenderawasih. Lokasi tersebut dipilih karena memiliki keterkaitan langsung dengan perencanaan kebijakan, pengelolaan administrasi personel, serta pelaksanaan tugas Ajen dalam operasi militer di wilayah Papua Tengah. Waktu penelitian dilaksanakan dalam rentang April hingga Desember 2025.

Subjek penelitian terdiri dari sejumlah informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung dalam pelaksanaan tugas Ajen dalam OMSP. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki kompetensi dan keterlibatan langsung dalam permasalahan yang diteliti. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik snowball sampling untuk memperoleh tambahan informan yang relevan berdasarkan rekomendasi dari

informan sebelumnya. Informan dalam penelitian ini antara lain pejabat staf operasi di lingkungan TNI Angkatan Darat, pejabat Direktorat Ajudan Jenderal Angkatan Darat, pejabat Ajen di Kodam XVII/Cenderawasih, serta personel yang memiliki pengalaman dalam penyelenggaraan pengurusan dan pemakaman jenazah prajurit di medan operasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa metode, yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara mendalam (in-depth interview) dengan para informan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan tugas Ajen dalam OMSP, mekanisme koordinasi antar satuan, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pengurusan dan pemakaman jenazah prajurit di medan operasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan fokus penelitian sehingga memungkinkan peneliti menggali informasi secara lebih fleksibel dan mendalam.

Selain wawancara, teknik observasi juga digunakan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi organisasi, mekanisme kerja, serta pola koordinasi antar unsur yang terlibat dalam pelaksanaan tugas Ajen. Observasi dilakukan dengan cara mengamati berbagai aktivitas yang berkaitan dengan fungsi administrasi personel dan penyelenggaraan kegiatan yang mendukung operasi militer. Melalui observasi, peneliti dapat memperoleh data empiris mengenai bagaimana peran Ajen dilaksanakan dalam praktik organisasi. Pengumpulan data juga dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah berbagai dokumen yang relevan dengan penelitian, seperti doktrin TNI Angkatan Darat, peraturan dan petunjuk teknis terkait kecabangan Ajen, laporan kegiatan operasi, serta dokumen administrasi yang berkaitan dengan pengurusan dan pemakaman jenazah prajurit di medan operasi. Studi dokumentasi bertujuan untuk memperoleh data sekunder yang dapat mendukung dan memperkuat hasil wawancara serta observasi yang dilakukan dalam penelitian. Data yang diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan data tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap kondensasi data, peneliti melakukan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, serta pengelompokan data yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data yang telah dikondensasi disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan pemahaman terhadap fenomena yang diteliti.

Untuk memastikan validitas dan keabsahan data penelitian, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, metode, serta waktu pengumpulan data yang berbeda. Dengan menggunakan teknik triangulasi, data yang diperoleh dapat diverifikasi sehingga meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap hasil penelitian. Selain itu, peneliti juga melakukan konfirmasi kepada informan (member check) untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Melalui tahapan penelitian tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi peran kecabangan Ajudan Jenderal dalam OMSP pengamanan wilayah rawan di Papua Tengah, serta menghasilkan rekomendasi strategis yang dapat mendukung peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas Ajen dalam mendukung operasi militer.

RESEARCH RESULTS AND DISCUSSION

Penelitian ini dilaksanakan di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Direktorat Ajudan Jenderal Angkatan Darat (Ditajenad), dan Kodam XVII/Cenderawasih. Hasil penelitian diperoleh melalui wawancara dengan informan, observasi kegiatan organisasi, serta analisis dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kecabangan Ajudan Jenderal dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecabangan

Ajudan Jenderal melaksanakan fungsi administrasi personel dan administrasi umum dalam mendukung pelaksanaan operasi militer. Dalam kegiatan OMSP pengamanan wilayah rawan di Papua Tengah, unsur Ajen melaksanakan pendataan personel yang terlibat operasi, pengelolaan administrasi personel, serta pengurusan hak-hak prajurit yang melaksanakan tugas operasi. Selain itu, unsur Ajen juga terlibat dalam penyelenggaraan pengurusan dan pemakaman jenazah prajurit yang gugur dalam pelaksanaan tugas operasi. Proses tersebut dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang meliputi identifikasi jenazah, pencatatan administrasi, koordinasi dengan unsur kesehatan, serta pengaturan proses pemakaman sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI Angkatan Darat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di lingkungan Ditajenad dan Kodam XVII/Cenderawasih, proses pengurusan jenazah prajurit dimulai dari laporan satuan tugas di lapangan mengenai kejadian gugurnya prajurit. Setelah laporan diterima, unsur kesehatan melakukan proses identifikasi jenazah serta pemeriksaan medis awal. Selanjutnya unsur Ajen melaksanakan pencatatan administrasi yang berkaitan dengan data personel prajurit yang gugur, termasuk dokumen identitas, data keluarga, serta dokumen administratif lain yang diperlukan dalam proses pemakaman. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi antara unsur Ajen dengan unsur kesehatan, komando satuan, dan unsur logistik dilakukan dalam proses evakuasi jenazah dari lokasi kejadian menuju fasilitas penanganan jenazah. Setelah proses administrasi selesai dilaksanakan, jenazah prajurit dipersiapkan untuk proses pemulangan ke daerah asal atau pemakaman di lokasi yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan OMSP di Papua Tengah, unsur Ajen melaksanakan pengelolaan berbagai dokumen administratif yang berkaitan dengan pelaksanaan operasi. Dokumen tersebut meliputi data personel yang terlibat operasi, laporan kegiatan administrasi, serta dokumen pendukung yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengurusan jenazah prajurit. Selain itu, kegiatan administrasi yang dilakukan oleh unsur Ajen juga mencakup pengelolaan data keluarga prajurit serta koordinasi dengan instansi terkait dalam proses penyampaian informasi kepada keluarga prajurit yang gugur. Informasi tersebut disampaikan melalui jalur komando yang berlaku dalam organisasi TNI Angkatan Darat.

Berdasarkan hasil observasi dan telaah dokumen, kegiatan pengurusan dan pemakaman jenazah prajurit dilaksanakan dengan mengikuti prosedur yang berlaku di lingkungan TNI Angkatan Darat. Proses tersebut melibatkan koordinasi antara beberapa unsur dalam organisasi, termasuk unsur kesehatan, unsur logistik, serta komando satuan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan operasi di wilayah tersebut. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan OMSP pengamanan wilayah rawan di Papua Tengah, unsur Ajen melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan moril prajurit. Kegiatan tersebut meliputi penyampaian informasi kepada prajurit mengenai administrasi personel, pengelolaan dokumen administrasi operasi, serta dukungan administratif lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas prajurit di medan operasi. Selain itu, kegiatan administrasi yang dilaksanakan oleh unsur Ajen juga mencakup pengarsipan dokumen operasi serta penyusunan laporan administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan OMSP. Dokumen tersebut digunakan sebagai bagian dari sistem administrasi organisasi dalam mendukung pelaksanaan operasi militer. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kecabangan Ajudan Jenderal melaksanakan berbagai fungsi administratif dalam mendukung pelaksanaan OMSP pengamanan wilayah rawan di Papua Tengah, termasuk pengelolaan administrasi personel, penyelenggaraan pengurusan dan pemakaman jenazah prajurit, serta pengelolaan dokumen administratif yang berkaitan dengan pelaksanaan operasi militer.

Discussion

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecabangan Ajudan Jenderal (Ajen) memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), khususnya dalam aspek administrasi personel dan penyelenggaraan pengurusan serta pemakaman jenazah prajurit yang gugur di medan operasi. Data penelitian yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas Ajen dalam OMSP meliputi pendataan personel, pengelolaan administrasi operasi, serta koordinasi dalam proses penanganan jenazah prajurit. Proses tersebut dilaksanakan melalui beberapa tahapan administratif yang melibatkan unsur kesehatan, komando satuan, serta unsur logistik dalam organisasi TNI Angkatan Darat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengurusan jenazah prajurit di medan operasi dilaksanakan melalui mekanisme yang terstruktur yang meliputi proses identifikasi jenazah, pencatatan administrasi, koordinasi dengan satuan terkait, serta proses pemulangan atau pemakaman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan proses tersebut menunjukkan bahwa kecabangan Ajen memiliki fungsi penting dalam menjaga ketertiban administrasi serta memastikan bahwa setiap prajurit yang gugur mendapatkan penghormatan yang layak dari negara. Dalam konteks organisasi militer, proses administratif tersebut tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan dokumen, tetapi juga memiliki dimensi simbolik yang berkaitan dengan penghormatan terhadap pengorbanan prajurit.

Temuan tersebut dapat dijelaskan melalui pendekatan teori peran organisasi yang menyatakan bahwa setiap unit dalam organisasi memiliki fungsi tertentu yang saling melengkapi dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks organisasi militer, kecabangan Ajen menjalankan fungsi administrasi yang berkaitan dengan pengelolaan personel serta berbagai kegiatan administratif yang mendukung pelaksanaan operasi militer. Fungsi tersebut menjadi bagian dari sistem organisasi yang memastikan bahwa setiap aspek operasional dapat berjalan secara terkoordinasi dan terdokumentasi dengan baik. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan OMSP di Papua Tengah, keterlibatan Ajen dalam banyak kasus masih berfokus pada aspek administratif setelah terjadinya peristiwa gugurnya prajurit. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran Ajen dalam pelaksanaan operasi militer lebih banyak muncul pada tahap pelaksanaan dan pengelolaan administrasi, sementara keterlibatan pada tahap perencanaan operasi masih relatif terbatas. Fakta tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara fungsi normatif kecabangan Ajen dalam organisasi militer dengan implementasi yang terjadi di lapangan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa efektivitas organisasi militer sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam mengintegrasikan berbagai fungsi pendukung operasi. Penelitian Albert, Baez, dan Rutland (2021) menunjukkan bahwa organisasi pertahanan modern memerlukan integrasi yang kuat antara fungsi operasional dan fungsi pendukung administrasi agar pelaksanaan operasi militer dapat berjalan secara efektif. Dalam konteks ini, keberadaan fungsi administrasi personel memiliki peran penting dalam menjaga kesinambungan operasi serta memastikan bahwa seluruh proses organisasi berjalan secara tertib. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Wicaksana (2021) juga menunjukkan bahwa keberhasilan operasi militer di wilayah konflik sangat dipengaruhi oleh koordinasi antar unsur dalam organisasi militer, termasuk unsur administrasi dan logistik. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa koordinasi yang baik antara berbagai unsur organisasi dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan operasi militer serta memperkuat sistem dukungan terhadap prajurit yang bertugas di medan operasi.

Meskipun demikian, hasil penelitian ini juga menunjukkan adanya beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek strategi militer, operasi tempur, serta kebijakan pertahanan secara umum.

Sementara itu, penelitian ini secara khusus menyoroti aspek administratif yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengurusan dan pemakaman jenazah prajurit dalam konteks OMSP. Fokus penelitian ini memberikan perspektif yang berbeda dengan penelitian sebelumnya karena menempatkan fungsi administrasi personel sebagai bagian penting dari sistem dukungan operasi militer. Berdasarkan hasil analisis penelitian, ditemukan bahwa optimalisasi peran kecabangan Ajen dalam OMSP memerlukan penguatan pada beberapa aspek penting, yaitu integrasi fungsi Ajen dalam perencanaan operasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan koordinasi antar kecabangan dalam organisasi TNI Angkatan Darat. Integrasi fungsi Ajen dalam perencanaan operasi memungkinkan penyusunan sistem administrasi yang lebih terstruktur sehingga proses pengelolaan personel serta penanganan jenazah prajurit dapat dilaksanakan secara lebih efektif.

Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan tugas Ajen di medan operasi. Personel Ajen yang memiliki kompetensi dalam bidang administrasi operasi serta penanganan jenazah prajurit dapat mendukung pelaksanaan tugas secara lebih profesional. Penguatan koordinasi antar kecabangan juga menjadi faktor penting karena pelaksanaan pengurusan jenazah prajurit melibatkan berbagai unsur organisasi seperti unsur kesehatan, logistik, serta komando satuan. Penelitian ini juga menghasilkan temuan kebaruan (novelty) baik dari aspek teoretis maupun praktis. Dari sisi teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian administrasi militer dengan menempatkan fungsi kecabangan Ajen sebagai bagian integral dari sistem dukungan operasi militer selain perang. Penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan administratif tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan dokumen, tetapi juga memiliki dimensi strategis dalam menjaga moril prajurit serta memperkuat legitimasi organisasi militer. Dari sisi praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi mengenai pentingnya penyusunan pedoman operasional yang lebih komprehensif terkait penyelenggaraan pengurusan dan pemakaman jenazah prajurit di medan operasi. Pedoman tersebut dapat menjadi acuan bagi satuan di lapangan dalam melaksanakan tugas secara lebih terstruktur dan terkoordinasi. Selain itu, pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi juga dapat mendukung pengelolaan administrasi personel serta dokumentasi operasi secara lebih efektif. Dengan demikian, pembahasan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kecabangan Ajudan Jenderal memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan OMSP, khususnya dalam aspek administrasi personel dan penghormatan terhadap prajurit yang gugur. Optimalisasi peran tersebut dapat mendukung peningkatan efektivitas pelaksanaan operasi militer serta memperkuat sistem dukungan organisasi dalam menjaga stabilitas keamanan nasional.

CONCLUSION

Penelitian ini menunjukkan bahwa kecabangan Ajudan Jenderal memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), khususnya dalam penyelenggaraan pengurusan dan pemakaman jenazah prajurit di medan operasi. Peran tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan fungsi administrasi personel, pengelolaan dokumen administrasi operasi, serta koordinasi dengan unsur kesehatan, logistik, dan komando satuan dalam proses penanganan jenazah prajurit yang gugur dalam pelaksanaan tugas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas tersebut telah berjalan melalui mekanisme administratif yang terstruktur, namun keterlibatan kecabangan Ajen dalam pelaksanaan OMSP masih lebih banyak terjadi pada tahap administratif dan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa integrasi peran Ajen dalam tahap perencanaan operasi belum sepenuhnya optimal sehingga diperlukan penguatan koordinasi dan sistem dukungan organisasi dalam pelaksanaan OMSP, khususnya pada operasi pengamanan wilayah rawan di Papua Tengah. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, terutama dalam ruang lingkup

penelitian yang hanya difokuskan pada implementasi peran kecabangan Ajen dalam konteks OMSP di wilayah Papua Tengah. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jumlah informan yang terbatas sehingga hasil penelitian belum menggambarkan secara menyeluruh implementasi peran kecabangan Ajen di seluruh wilayah operasi TNI Angkatan Darat. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji peran kecabangan Ajen dalam konteks operasi militer yang lebih luas serta menggunakan pendekatan penelitian yang lebih beragam agar memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai sistem dukungan administrasi personel dalam organisasi militer.

BIBLIOGRAPHY

- Albert, M., Baez, A., & Rutland, P. (2021). National security in the digital and post-pandemic era. *Journal of Strategic Security*, 14(2), 1–15. <https://doi.org/10.5038/1944-0472.14.2.1876>
- Arfianti, & Nurinaya, A. (2019). SWOT analysis in improving organizational competitiveness. *Economix Journal*, 7(1), 1–10. <https://doi.org/10.24252/economix.v7i1.12345>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Deni, D., & Wicaksana, S. W. (2021). Indonesia's defense strategy in Papua conflict management perspective. *Journal of Defense & Security Studies*, 5(2), 121–134. <https://doi.org/10.33172/jdss.v5i2.1032>
- Direktorat Ajudan Jenderal TNI Angkatan Darat. (2021). *Pedoman Ajudan Jenderal dalam operasi militer untuk perang*. Bandung: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.
- Direktorat Ajudan Jenderal TNI Angkatan Darat. (2025). *Pedoman peran kecabangan Ajudan Jenderal dalam operasi lawan insurjensi*. Bandung: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.
- Hidayat, T., & Nugroho, S. (2020). Military organization management in supporting non-war military operations. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 10(3), 245–260. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v10i3.899>
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2024). *Strategi kebijakan pertahanan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Kristian, I., & Subagyo, A. (2023). Organizational effectiveness in defense management systems. *Jurnal Manajemen Pertahanan*, 9(2), 115–129. <https://doi.org/10.33172/jmp.v9i2.1520>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Prasetyo, B., & Rahman, A. (2022). The role of military human resource management in national defense strategy. *International Journal of Military Studies*, 6(1), 45–59. <https://doi.org/10.1080/ijms.2022.1156>
- Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara*.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*.
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara*.
- Setiawan, A., & Raharjo, B. (2021). Civil–military cooperation in non-war military operations. *Jurnal Strategi Pertahanan Darat*, 7(1), 33–48. <https://doi.org/10.33172/jspd.v7i1.987>
- Suryadi, R., & Putra, M. (2020). Military administration and operational effectiveness in defense organizations. *Defense Management Review*, 8(2), 89–102. <https://doi.org/10.1080/dmr.2020.8821>
- Wicaksana, S. W. (2021). Desecuritization strategy of Indonesia in Papua from a defense management perspective. *Jurnal Pertahanan Indonesia*, 11(2), 101–118. <https://doi.org/10.33172/jpi.v11i2.1130>